Jurnal Tarjih - Volume 13 Nomor 1 (2016), hlm. 67-80

ULAMA SEBAGAI PENYEIMBANG KEKUATAN SOSIAL POLITIK DI INDONESIA

Okrisal Eka Putra
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
okrisal@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kaitan agama dengan bidang kehidupan sosial yang menjadikan politik sebagai salah satu ruang lingkupnya. Mulai dari zaman Orde Lama, Orde Baru, bahkan zaman reformasi pun, partai Islam yang nota bene merupakan perwakilan aspirasi politik umat Islam tidak pernah menjadi pemenang dalam setiap pemilu. Pertanyaannya adalah ada apa dengan umat Islam Indonesia sehingga dalam setiap proses demokrasi hanya dimanfaatkan oleh kelompok yang ingin meraih kekuasaan di negeri ini. Tulisan ini memperkaya khazanah pemikiran tentang peran ulama dalam bidang politik dan juga dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam dalam kehidupan bernegara. Permasalahannya berdasar pada pemahaman umat Islam tentang kekuasaan, ayat, dan hadis yang berisi tentang kekuasaan yang selalu multi intrepretatif, yang pada gilirannya melahirkan puspawarna pemahaman dan mengkristal menjadi kelompok yang solid. Perbedaan itu cenderung sulit disatukan dalam satu wadah politik. Eksistensi primodialisme lebih menonjol daripada memikirkan kemajuan umat Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kata kunci: ulama dan politik, islam dan orde baru

Pendahuluan

Sejak era prakemerdekaan hampir tidak ada peristiwa sejarah penting dalam perjalanan berbangsa dan bernegara ini melainkan pasti melibatkan ulama sebagai poros utama proses penyadaran masyarakat tentang makna kemerdekaan. Ulama selalu tampil pertama untuk mengajarkan kesadaran kolektif untuk memulai perubahan. Seiring berjalannya waktu, setelah kemerdekaan sampai era reformasi inipun umat islam mulai kesulitan menemukan sosok ulama yang mumpuni di masyarakat. Yang muncul saat ini adalah ulama-ulama yang hanya ahli dalam bidang agama, tapi mengenyampingkan kemajuan ilmu-ilmu eksakta. lebih ironis lagi ulama hari ini lebih mementingkan *benefit personal* dengan lebih dikenal sebagai artis ketimbang ketokohan ulamanya, bahkan tidak tampil sebagai negarawan sejati sehingga mudah dipermainkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari ke-mayoritas-an umat islam di Indonesia. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme sektoral yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran ulama makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah mediator silaturahmi nasional umat Islam demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Dalam sebuah etika yang tidak tertulis para ulama mempunyai tanggung jawab mendidik umat dengan nilai-nilai luhur dan menyatukan umat dalam harmonisasi bingkai kenegaraan, setiap kata yang terucap adalah himbauan persatuan dan memerangi perpecahan umat. Kalau selama ini para ulama mengejawantahkan nilai ini dalam ruang lingkup kecil seperti pesantren, yayasan pendidikan, dan lembaga-lembaga keagamaan, sekarang ulama dituntut lebih luas untuk menguasai disiplin ilmu yang komprehensif agar terintegrasi dengan nilai-nilai agama yang luhur. Ulama juga tidak boleh *gaptek* terhadap perkembangan tekonologi, karena kemajuan tekonologi kalau tidak dikawal batasan-batasan agama akan merubah menjadi senjata yang bisa mengancam perabadaban manusia.

Fenomena ini dilandasi oleh tipologi pemikiran formalistik, yakni pemikiran yang mengutamakan peneguhan dan ketaatan yang ketat pada format ajaran Islam. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya konsep sakral yang melingkupi nilai-nilai keagamaan sehingga hal tersebut tidak mudah untuk dirubah dan memiliki otoritas yang kuat di masyarakat.[1]

Salah satu godaan juga terhadap ulama adalah godaan politik, para ulama yang selama ini dianggap manusia suci

1. Dengan mendasarkan pada perspektif fungsionalis, Thomas F. O'Dea mengungkapkan bahwa agama memiliki fungsi dalam menyediakan dua hal. Pertama, suatu cakrawala pandangan tentang dunia luar yang tidak terjangkau oleh manusia (*beyond*). Kedua, sarana ritual yang memungkinkan hubungan manusia dengan hal diluar jangkauannya, yang memberikan jaminan dan keselamatan bagi manusia; Thomas F. O'Dea, *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.25-9.

juga tidak bisa mengelak dari fenomena baru ini, kesucian mereka akan dipertaruhkan dengan dunia politik yang sarat dengan aroma kelicikan dan kobohongan, sebuah nilai yang sangat mereka tentang dan jauhi serta ditanamkan kepada generasi muda. Tapi bukan berarti para tokoh agama harus menjauhi dunia politik dan lembaga pemerintahan, karena mendiamkan kemaksiatan dan kemunafikan juga merupakan dosa karena melalaikan tugas kenabian yang mereka emban. Peran ulama juga dibutuhkan sebagai pengontrol kekuasaan. Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan.

Ulama dalam Pusaran Dinamika Politik

Pada tingkat konseptual dan tataran praktis terdapat hubungan yang problematik antara *ad-dīn* (agama) dan *siyāsah* (politik). Akibatnya tidak jarang terjadi ketegangan dan tarik menarik penafsiran. Karena ketegangan tersebut, bisa dipahami ada kalangan ulama yang secara cukup idealistik dan memegangi ajaran-ajaran normatif agama berusaha menjauhkan diri serta menjaga jarak dengan politik. Anggapan mereka berpolitik akan mengurangi dan mengerogoti integritas keulamaan mereka yang pada giliran selanjutnya menghilangkan kewibawaan agama.

Tapi sikap idealistik ini sering mendapatkan godaan dari kelompok yang ingin memanfaatkan kekarismatikan para ulama. Para pelaku poltik di negari ini yakin dengan sebuah hipotesa bahwa jika kekuasaan politik kuat, jadi hampir bisa dipastikan bahwa kekuatan ulama menjadi merosot. Sebaliknya jika kekuasaan politik mengalami kemerosotan, maka ulama bisa tampil ke depan untuk mengisi kevakuman kepemimpinan masyarakat.

Tetapi tak jarang keterlibatan para ulama dalam berpolitik bukan karena paksaan dan iming-iming sesuatu, mereka terjun ke kancah politik dengan kesadaran pribadi menggunakan argumen keadilan dan demokratisasi, karena menurut mereka stabilitas politik merupakan persyaratan mutlak untuk terselenggaranya kewajiban-kewajiban agama. Dan sebaliknya kekacauan atau situasi akan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kewajiban agama. Hal ini yang sering mendorong pada tokoh agama memberikan legitimasi kepada kekuasaan, walaupun kadang kekuasaan itu diperoleh dengan cara yang tidak wajar.

Peran para ulama dalam masyarakat sesungguhnya memiliki arti penting, ulama memiliki wibawa, karisma dan jelas dihormati masyarakat karena keluhuran akhlaknya. hal ini akan berbeda ketika para tokoh agama

masuk dalam permainan politik yang mengharuskan ada lawan dan kawan. keterlibatan ulama dalam permainan politik akan membuat karisma dan wibawa perlahan-lahan akan terkikis dalam pandangan masyarakat yang bukan kelompoknya.

Ulama sebagai tokoh panutan bagi masyarakat, hendaknya bisa bersikap netral di tengah masyarakat. ulama juga dituntut untuk memiliki keberanian mengatakan yang benar, itu benar dan salah itu salah. penguasa harus bisa menghargai pendapat dan kritik dari ulama, walaupun itu terasa pahit. lewat kejujuran dan keteladanan moral yang dimiliki ulama, diharapkan mampu menghapus berbagai kegelapan yang melanda masyarakat saat ini.

Ulama memiliki peran yang cukup penting di tengah masyarakat bagaikan benteng moralitas, teladan ukhuwah dan penyubur batin bagi masyarakat yang dilanda kegersangan spiritual. ada yang menilai, bahwa ulama saat ini telah mengalami pergeseran nilai, sehingga karisma yang dimiliki ulama saat ini seolah mengalami kelenturan karena banyak godaan materialisme yang melanda ulama.

Kalau diperhatikan ketika ulama yang bermetamorfosis menjadi politisi. *pertama*, jagad keulamaan bangsa ini akan mengalami penurunan moral. Kita akan kehabisan cadangan independen yang mendudukkan dirinya di posisi tengah-tengah antara rakyat dan pemerintah. kita akan kekurangan manusia yang mampu menjaga jarak secara adil dan seimbang apabila terjadi konflik antara penghuni bangsa ini. sebab, walaupun politik adalah suatu karsa untuk menegakkan moralitas dan rasionalitas publik, tetapi kenyataan di negara kita masih jauh panggang dari pada api. *kedua*, profesi politisi ternyata jauh lebih menggiurkanpadahal praktik politik kita bukan lahan subur untuk idealitas dan perjuangan moral.[2]

Ulama harus pandai dalam menunjukkan ragam isu pada umat, baik lewat tulisan maupun perbuatan, mulai dari kritik ekonomi, kebijakan pemerintah, kebudayaan, politik, bahkan musik. tegasnya fungsi ulama adalah berbicara benar pada kekuasaan, terlebih pada penguasa yang lalim, korup,dan otoriter. oleh karena itu ulama ideal adalah mereka yang berani menderita untuk idealismenya, yang berani mengatakan kebenaran walaupun pahit, berani miskin walaupun diejek, berani kritis walau dilecehkan, dan yang berani berbeda walaupun dianggap melawan arus. [3]

Dalam kaitannya dengan politik, *knowledge* yang dimiliki para ulama merupakan power yang sangat potensial digunakan untuk menggalang umat secara keseluruhan guna mewujudkan suatu tindakan atau proses politik tertentu. Ini bisa dilihat ketika proses memberikan suara dalam pemilu, masyarakat awam bukan hanya

2. Komaruddin Hidayat dan M. Yudhie Haryono, *Manuver Politik Ulama* (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), hlm. 11,13.

3. *Ibid.*, hlm. 15.

memahami sebagai tindakan politik, tapi sebuah tindakan keagamaan bahkan ibadah, karena yang memerintahkan adalah ulama.

Untuk kedepan kita tentu mengharapkan ulama kembali ke tugas pokoknya yaitu memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang sesuai dengan tuntunan Ilahi, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, melakukan terobosan-terobosan untuk terwujudnya *ukhuwah Islamiyah* dan kerukunan antar-umat beragama,menjadi mediator antara umat dan *umaro* guna menciptakan masyarakat madani, menjembatani hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin agar tidak mudah diadu domba.

Untuk kepentingan dakwah jangka panjang, perlu juga dipikirkan kembali penyaluran aspirasi umat islam melalui para tokoh agama. Artinya, kalau memang ulama dianggap sebagai tokoh perekat tali *ukhuwah* di tengah masyarakat, maka ada baiknya jika kepada ulama dan semua tokoh-tokoh agama diberi jatah kursi di legislatif sebagai fraksi khusus sebagaimana dulu fraksi TNI/Polri. Sehingga aspirasi umat melalui ulama bisa disalurkan dan memang sangat dibutuhkan untuk menciptakan negara Indonesia yang sejahtera dan sejajar dengan negara lain.

Politisi Muslim: Antara Nurani dan Kekuasaan

Politik Islam secara substansial merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku (*political behavior*) serta budaya politik (*political culture*) yang berorentasi pada nilai-nilai Islam. Kecurigaan terhadap sesama orang Islam ini karena didasari oleh ketidaktahuan, lebih dari itu adalah wacana yang dikembangkan pada zaman orde Baru bahwa Islam di Indonesia hanya ada 2 yaitu Islam tradisional yaitu NU dan Islam modern yaitu Muhamadiyah.[4] Dikotomi Islam yang mengkutub pada Gerakan Muhamadiyah dan Nahdhatul Ulama yang menjadi simbol Islam modernis dan Islam tradisional selama puluhan tahun telah menjadi wacana baku dalam mengkaji Islam di Indonesia. Orang selalu saja mengkaitkan Islam dengan Muhamadiyah dan NU. Jika ada gerakan

4. Muhamadiyah dan NU menjadi mainstream wacana Islam di Indonesia, bukan hanya karena jumlah massa yang besar. Bahwa Muhamadiyah dan NU selain karena jumlah masanya yang besar, juga karena kedua organisasi Islam itu mau mendukung penguasa orde baru. Beberapa orang pemerintah ditempatkan menjadi pengurus di kedua organisasi itu. Penerimaan Pancasila oleh Muhamadiyah dan NU sebagai satu-satunya asas adalah simbol ketundukan kedua organisasi itu terhadap kekuasaan pemerintah orde baru. Dalam konteks ini Pancasila diposisikan sebagai totem, atau malah sebagai sebagai "agama" yang dipaksakan oleh oleh pemerintah untuk diterima oleh semua lapisan masyarakat.

atau kelompok di luar Muhamadiyah[5] dan NU maka akan segera dicap sebagai Islam sempalan, dan lebih ekstrem lagi dicap sebagai Islam aliran sesat yang harus dilarang dan dibubarkan.

Sikap perilaku serta budaya politik memakai kata sifat Islam, hal ini berarti lahir dari suatu keprihatinan moral dan doktinal terhadap keutuhan komunitas spritual Islam akan adanya gerakan dakwah. Indonesia dikenal sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di seluruh dunia. Islam menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan apabila ingin memahami politik Indonesia. Salah satu ciri khas dari tradisi keislaman adalah kepercayaan bahwa Islam merupakan sebuah pandangan hidup yang menyeluruh dan terpadu. Agama mempunyai suatu hubungan yang integral dan organik dengan politik dan masyarakat. Cita-cita keislaman itu tercermin dalam perkembangan hukum Islam yang merupakan sebuah hukum terpadu, yang mencakup kewajiban-kewajiban seorang muslim kepada Tuhan (sholat, puasa, pergi haji) dan kewajiban-kewajiban kepada sesama manusia (hukum, keluarga, perdagangan, pidana). Oleh karena itu, tradisi Islam menawarkan suatu sistem normatif dimana agama adalah integral dengan semua aspek kehidupan baik muslim politik, ekonomi baru telah banyak dianalisis oleh para pengamat politik.

Sejak awal, para pemimpin dan aktivis muslim sadar bahwa perbaikan kondisi yang memprihatinkan itu memerlukan perjuangan politik, yaitu berurusan dengan upaya memperoleh kekuasaan. Sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi tindakan dan pikiran orang lain dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik, kekuasaan sangat penting. Apapun tujuan akhir yang hendak diperjuangkan, setiap aktivis harus mencapai tujuan antara memperoleh kemampuan mempengaruhi orang dan proses kebijakan. Dengan kata lain, harus memperoleh kekuasaan. Tujuan akhir seperti mengurangi kemiskinan rakyat pasti memerlukan kemampuan mempengaruhi proses kebijakan publik, jadi persoalan politik dan kekuasaan selalu inheren di dalam setiap perjuangan. Dalam pengertian ini, perjuangan politik untuk membebaskan umat Islam sendiri dari kemiskinan adalah persoalan enpowerment atau pemberdayaan umat, yaitu pemberiaan daya pada mereka sehingga bisa menyelesaikan

5. Sebelum kemerdekaan Indonesia, ada tiga hal yang menarik dari gerakan Muhammadiyah, yaitu: pertama, Muhammadiyah merupakan gerakan pembaharuan Islam yang ide-idenya telah menyumbangkan pemeliharaan Islam sehingga menjadi satu unsur penting dalam perpolitikan Indonesia. Kedua, Muhammadiyah telah tampil menghadapi berbagai ancaman ideologi politik modern seperti kolonialisme dan sekulerisme. Ketiga, Muhammadiyah tetap bertahan dan memiliki akar kuat dalam masyarakat, walaupun seringkali timbul persoalan intern. Selanjutnya baca Teuku Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hlm. 340-343.

sendiri persoalan hidupnya dengan lebih baik.

Namun yang sangat disayangkan, untuk mewujudkan itu semua, para aktivis muslim menempuh metoda dan strategi yang berbeda-beda, bahkan terkesan saling bertentangan dan seolah-olah berhadapan. Dari semua strategi tersebut bisa disimpulkan menjadi dua metoda: pertama adalah, strategi islamisasi negara demi masyarakat dan yang kedua adalah, strategi islamisasi masyarakat dalam negara nasional. Untuk memudahkan pemahaman terhadap dua strategi tersebut bisa dijelaskan, jika model pertama berasumsi bahwa negara harus mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan hukum Islam, maka strategi kedua berasumsi bahwa negara tidak terlalu ikut campur dalam kehidupan masyarakat.

Untuk strategi pertama bisa dilihat dari perjalanan sejarah perjuangan pada masa awal kemerdekaan itu mendorong para pemimpin Islam untuk menerapkan kebijakan yang konfrontatif, dalam wilayah aplikasi bisa muncul dalam beragam wajah, seperti memperjuangkan pemuatan hukum-hukum Islam dalam konstitusi (melalui Piagam Jakarta) dan penguasaan dalam pembuat undang-undang,[6] yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, sampai perjuangan fisik, hal ini bisa dilihat dari perlawanan kelompok Islam yang mengatasnamakan Islam sebagai simbol perjuangan melawan pemerintah. Dan juga untuk menegaskan identitas yang membedakan diri dengan kelompok lain, sampai penguasaan birokrasi pemerintah. Paling tidak sampai akhir 1980-an, hampir semua upaya itu mengalami kegagalan. Ternyata strategi ini tidak cukup kuat untuk membuat pemegang kekuasaan mengakomodasi tuntutan mereka.

Diantara para pembuat strategi ini sedikit memudar, karena di akhir tahun 1970-an muncul satu generasi Islam dengan mutu intelektual yang lebih baik dan tentu saja lebih mampu bersaing memperebutkan jabatan publik maupun politik. Dalam arena politik muncul pula sekelompok lain dengan agenda yang lebih canggih.

Sumber dari hubungan yang canggung antara dakwah dan politik menurut Azyumardi Azra karena berkaitan dengan kenyataan bahwa din dalam pengertian terbatas berkenaan dengan bidang-bidang ilahiah, yang bersifat suci dan sakral, meski bau "keagamaan" bisa melekat dalam

6. Setelah pemilu 1955 dan memunculkan empat kekuatan besar yaitu: PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Mereka beradu argumentasi kembali mengenai dasar negara. Ada tiga ideologi yang ditawarkan, yaitu Islam, Pancasila, dan Sosial-Ekonomi. Akan tetapi dalam perjalanannya pembahasan tentang ini berlarut-larut yang pada akhirnya dibentuklah tim perumus yang beranggotakan 18 orang yang mewakili masing-masing kelompok. Namun sebelum berhasil menemukan kata sepakat, tim perumus tersebut dibubarkan oleh presiden Soekarno karena sampai tanggal 2 juni 1959 belum juga ada kesepakatan, dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Konstituante dibubarkan dan Demokrasi Parlementer diganti menjadi Demokrasi Terpimpin.

tindakan politik, tetapi politik (siyasah) umumnya jelas merupakan bidang profan atau keduniaan. Apalagi by definition, politik menyangkut upaya merebut, mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan, kalau perlu dengan cara apapun. Jadi, by nature politik adalah "permainan", yang melibatkan berbagai macam tindakan dan trick atau bahkan memanipulasi yang tidak selaras dengan norma-norma ilahiah atau agama. Di sinilah terdapat akar-akar ketegangan konseptual antara norma-norma agama dengan politik, yang tidak selalu dengan mudah dapat didamaikan.[7]

Bila dunia politik dan dunia dakwah dicermati, ada perbedaan amat kontras. Kalau dunia politik penuh siasat bahkan tipu muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Bahkan dalam kamus politik disebutkan yang berbicara adalah kepentingan dan tidak mengenal kawan dan musuh abadi. Itulah dalam praktek politik sering terjadi tindakan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Untuk itu apabila bila seorang kiai ingin memperbaiki keadaan yang rusak, sebaiknya dilakukan lewat seruan dakwah. Jangan sampai seorang kiai melibatkan diri dalam politik praktis, sebab dikhawatirkan akan mengabaikan kewajiban terhadap pembinaan masyarakat. Bahkan godaan politik yang ada dikhawatirkan bisa membuat para kiai terseret kondisi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur agama.[8]

Peran Lembaga Pendidikan Islam

Di seluruh dunia Islam --termasuk Indonesia-- pembaruan pendidikan Islam itu terwujud dalam dua langkah utama. *Pertama*, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan baru dengan menerapkan sistem pendidikan modern. *Kedua*, mentrasformasikan lembaga-lembaga pendidikan tradisional menjadi lembaga-lembaga pendidikan modern. Dua cara tersebut dilakukan dengan cara mengadopsi sistem pendididkan Barat. Untuk kasus Indonesia, mengadopsi sistem pendidikan modern itu diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Pembaruan pendidikan Islam di Indonesia khususnya dalam dasawarsa 70-an lebih ditentukan oleh tangan-tangan birokrasi. Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI) sejak berdirinya bertujuan melakukan pembaruan pendidikan Islam, dalam perkembangan berikutnya bergabung dengan salah satu kekuatan politik. Proses "urbanisasi" di lingkungan GUPPI melalui tangan birokrasi pemerintah, bahkan mengikatkan diri dengan Golkar yang merupakan mesin politik utama pemerintah Orde Baru. [9]

7. Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara* (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. 119.

8. Deliar Noer, *Umat Islam di Panggung Politik* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 112.

9. Pendirian berbagai organisasi-organisasi keagamaan Islam oleh GOLKAR merupakan upaya untuk "menjinakkan" kekuatan Islam politik. Disamping GUPPI, GOLKAR mendirikan Majelis Dakwah Islamiah (MDI),

Afiliasi terhadap salah satu kekuatan politik yang dilakukan oleh GUPPI tersebut pada masanya sangat beralasan, sebab pemerintah Orde Baru menjadikan birokrasi sebagai alat efektif untuk menggerakkan program modernisasi dan pembangunan. Dengan cara ini, birokrasi Orde Baru berporos pada kekuatan teknokrat sipil dan militer, menjadi kekuatan yang tangguh dalam konstalasi Indonesia.

Sayangnya, kesadaran untuk menjadikan politik sebagai strategi pembaruan pendidikan tidak ditentukan oleh GUPPI. Keterlibatannya dalam politik lebih disebabkan oleh dorongan-dorongan dari luar organisasi. Dengan demikian, GUPPI yang hendak menggunakan pengaruh politiknya untuk mengadakan pembaruan pendidikan Islam malah jadi sebaliknya, yakni pendidikannya terkubur oleh misi politik.

Sering dilupakan oleh banyak kalangan bahwa salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam adalah aspek politik. Dalam aspek ini dijelaskan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, sistem pemerintahan, hubungan antar negara, hubungan antar organisasi dan lain-lain. Atas dasar ini, antara pendidikan Islam dan politik punya hubungan erat yang sulit untuk dipisahkan.

Kemunculan madrasah di Indonesia merupakan konsekuensi dari proses modernisasi surau yang cenderung disebabkan oleh terjadinya tarik-menarik antara sistem pendidikan tradisional dengan munculnya lembaga pendidikan modern dari Barat. Ki Hajar Dewantara menyadari bahwa ulama telah melahirkan sistem budaya kerakyatan yang bercorak kemasyarakatan dan politik, disamping spritual. Hal ini terbukti banyaknya para alumni pesantren yang melanjutkan studi ke universitas terkemuka baik di dalam maupun luar negeri.[10] Madrasah di Indonesia yang dikelola oleh suatu organisasi sosial kemasyarakatan banyak dipengaruhi oleh orientasi organisasinya. Madrasah yang didirikan Muhammadiyah lebih bersifat ala Muhammadiyah. Demikian halnya dengan madrasah yang dikelola NU orientasi pendidikannya lebih menitikberatkan pada kemurnian mazhab.

Konsekuensi dari keragaman orientasi pendidikan tersebut adalah munculnya para tokoh formal dan informal yang memiliki pemikiran dan pergerakan politik yang berbeda.[11]

Satkar Ulama, Al Hidayah (kelompok pengajian wanita GOLKAR).

10. M. Dawan Raharjo, *Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku Politik, Risalah Cendikiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 192; lihat juga Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Risalah, 1983), hlm. 6-7.

11. Azyumardi Azra, "Pendidikan Tinggi Islam dan Kemajuan Sains, Sebuah Pengantar", dalam Charles Michael Stanton, *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, terj. Afandi dan Hasan Asari (Jakarta: Logos, 1994); baca juga Lambton, *State and Government in Medievel Islam, An Introduction to the Study of Islamic Political Theory: The Yurists* (Oxford: Oxford University Press, 1991), hlm. 23.

Ada yang berfikir lebih modernis, fundamentalis, tradisionalis dan nasionalis. Meski perilaku politik seorang tokoh semata-mata tidak hanya ditentukan oleh institusi pendidikan tertentu dan masih ada faktor lain (lingkungan, sosiokultural, potensi berfikir, dan lain sebagainya), namun pengaruh suatu institusi pendidikan cukup berarti dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang untuk mempunyai paradigma berpikir yang berbeda. Sebagai contoh apa yang diungkapkan oleh Geertz, seorang santri (penganut aliran Islam) akan memilih Masyumi atau partai NU tepatnya sejak 1952. Seorang yang berasal dari kelurga priyayi (pegawai) dan kaum abangan akan memilih Partai Nasional Indonesia (PNI). Dengan demikian, Geertz menyimpulkan bahwa peranan politik seseorang pastilah sesuai dengan basis sosial dan ideologinya. Peranan politik orang Indonesia selalu sejalan dengan corak keagamaan yang dianutnya, yang oleh Geertz disebutnya sebagai aliran. Kesimpulan ini diperolehnya setelah ia mengadakan penelitian di "Mojokuto" (nama samaran untuk kota Pare, Kediri, Timur Jawa) pada tahun 1950-an.

Signifikansi dan implikasi politik terhadap pendidikan suatu institusi pendidikan dan pengembangan madrasah atau pendidikan Islam pada umumnya bagi penguasa muslim sudah sangat jelas. Dalam banyak kasus, madrasah-madrasah didirikan untuk menunjang kepentingan-kepentingan politik tertentu dari penguasa muslim, diantaranya untuk menciptakan dan memperkokoh citra penguasa sebagai orang-orang yang mempunyai kesalehan, minat dan kepedulian umat, dan hal ini lebih penting lagi yaitu sebagai pembela ortodosi Islam.

Semua ini pada gilirannya untuk memperkuat legitimasi penguasa *vis a vis* rakyat. Menurut Azyumardi, bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam sejak masa klasik hingga masa pertengahan, atau tepatnya masa pramodern, tidak menjadikan "pendidikan politik" sebagai agenda. Sebagaimana diketahui bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam di masa-masa tersebut lebih merupakan salah satu wahana utama bagi transisi bahkan" pengawetan ilmu-ilmu Islam", meski pendirian madrasah, misalnya sering dikaitkan erat dengan motif-motif politik, namun jika ditelusuri lebih jauh terdapat indikasi yang kuat bahwa ia tidak terlibat dalam proses-proses politik. Absolutisme politik muslim sebagaimana terlibat dalam eksistensi berbagai macam dinasti tidak memberikan ruang, bukan hanya bagi keterlibatan komunitas madrasah, melainkan bahkan masyarakat muslim umumya, untuk turut serta dalam proses-proses politik, dan mewujudkan partisipasi politik mereka.[12]

Pendidikan politik, dengan demikian mungkin sedikit sekali

12. Azyumardi Azra, "Sosialisasi Politik dan Pendidikan Islam", *Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan Madrasah*, Vol. I, nomor, 02/1/1997, hlm. 22.

mempunyai relavansi dengan sistem dan kelembagaan pendidikan Islam klasik dan abad pertengahan. Tetapi ini tidak berarti bahwa apa yang kita sebut sebagai "pendidikan politik" --terlepas dari tingkatan intensitas dan kedalamannya tidak berlangsung dalam masyarakat muslim umumnya. Bahkan "pendidikan politik" itu mungkin menjadi salah satu fokus utama bagi para pemikir politik muslim untuk merumuskan dan mengajarkan hak-hak dan kewajiban timbal balik antara penguasa dan rakyat. Bahkan para pemikir semacam ini menerbitkan kitab-kitab panduan, termasuk karya al-Ghazali *Naṣīḥat al-Mulk* yang diperuntukkan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, semua hal yang bisa dipandang sebagai " pendidikan politik" ini pada umumnya dilihat dari perspektif syariat dan fiqh.[13]

Dengan demikian, terjadi ketidaksesuaian (*incongruence*) antara sosialisasi politik yang diperoleh melalui pendidikan dengan apa yang didapat dari lembaga-lembaga sosial lainnya. Kembali dalam konteks negara-negara muslim, ketidaksesuaian itu disebabkan oleh dua factor, *pertama*, tetap dominannya keutamaan keluarga dalam proses sosialisasi masyarakat yang sebagiannya bermukim di wilayah pedesaan; *kedua*, sistem pendidikan formal memikul beban sosialisasi yang cukup berat.

Pembahasan politik Islam memang diakui sangat kompleks, hal ini disebabkan karena pada tataran konseptual sudah mengandung masalah yang rumit. Sebut saja pembahasan tentang konsep politik, pada tahap ini saja sudah melahirkan beberapa presepsi yang berbeda-beda, belum lagi berbenturan dengan tradisi politik lokal.

Pada tingkat konseptual dan tataran praktis terdapat hubungan yang problematik antara *ad-dīn* (agama) dan *siyāsah* (politik). Akibatnya tidak jarang terjadi ketegangan dan tarik menarik penafsiran. Karena ketegangan tersebut, bisa dipahami ada kalangan ulama yang secara cukup idealistik dan memegangi ajaran-ajaran normatif agama berusaha menjauhkan diri serta menjaga jarak dengan politik. Anggapan mereka berpolitik akan mengurangi dan mengerogoti integritas keulamaan mereka yang pada giliran selanjutnya menghilangkan kewibawaan agama. Tapi sikap idealistik ini sering mendapatkan godaan dari kelompok yang ingin memanfaatkan kekarismatikan para ulama. Para pelaku poltik di negari ini yakin dengan sebuah hipotesa bahwa jika kekuasaan politik kuat, jadi hampir bisa dipastikan bahwa kekuatan ulama menjadi merosot. Sebaliknya jika kekuasaan politik mengalami kemerosotan, maka ulama bisa tampil ke depan untuk mengisi kevakuman kepemimpinan masyarakat. Tetapi tak jarang keterlibatan para ulama dalam berpolitik bukan karena paksaan dan iming-iming sesuatu, mereka terjun ke kancah politik dengan kesadaran pribadi menggunakan argumen keadilan dan

13. *Ibid.*, hlm. 23.

demokratisasi, karena menurut mereka stabilitas politik merupakan persyaratan mutlak untuk terselenggaranya kewajiban-kewajiban agama. Dan sebaliknya kekacauan atau situasi akan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kewajiban agama. Hal ini yang sering mendorong pada tokoh agama memberikan legitimasi kepada kekuasaan, walaupun kadang kekuasaan itu diperoleh dengan cara yang tidak wajar.

Ulama Sebagai Penyeimbang Kekuatan Politik

Peran para ulama dalam masyarakat sesungguhnya memiliki arti penting, ulama memiliki wibawa, karisma dan jelas dihormati masyarakat karena keluhuran akhlaknya. hal ini akan berbeda ketika para tokoh agama masuk dalam permainan politik yang mengharuskan ada lawan dan kawan. keterlibatan ulama dalam permainan politik akan membuat karisma dan wibawa perlahan-lahan akan terkikis dalam pandangan masyarakat yang bukan kelompoknya. Ulama sebagai tokoh panutan bagi masyarakat, hendaknya bisa bersikap netral di tengah masyarakat. ulama juga dituntut untuk memiliki keberanian mengatakan yang benar, itu benar dan salah itu salah. penguasa harus bisa menghargai pendapat dan kritik dari ulama, walaupun itu terasa pahit. lewat kejujuran dan keteladanan moral yang dimiliki ulama, diharapkan mampu menghapus berbagai kegelapan yang melanda masyarakat saat ini.

Ulama memiliki peran yang cukup penting di tengah masyarakat bagaikan benteng moralitas, teladan ukhuwah dan penyubur batin bagi masyarakat yang dilanda kegersangan spiritual. ada yang menilai, bahwa ulama saat ini telah mengalami pergeseran nilai, sehingga karisma yang dimiliki ulama saat ini seolah mengalami kelenturan karena banyak godaan materialisme yang melanda ulama. Ketika ada anggapan bahwa peran politik kiai sudah mulai luntur mungkin ada juga benarnya. dalam hal ini, peran ulama dalam bidang politik harus jelas dibedakan. artinya dalam bidang agama kiai boleh saja menjadi panutan, namun dalam bidang politik belum tentu demikian. hal ini menunjukkan semakin dewasanya politik masyarakat. jadi untuk menentukan pilihan politik, masyarakat tidak lagi bergantung pada aspirasi politik kiai. Untuk kepentingan dakwah jangka panjang, ulama sebaiknya tidak perlu terlibat aktif dalam politik praktis. ulama justru lebih baik kembali pada peran ulamanya. barangkali untuk menjaga kenetralan ulama pun, perlu dipikirkan kembali penyaluran politik mereka. artinya, kalau memang ulama dianggap sebagai tokoh perekat tali ukhuwah di tengah masyarakat, maka ada baiknya jika kepada ulama dan semua tokoh-tokoh agama diberi jatah kursi di dpr dan dprd. sehingga aspirasi politik ulama memang tidak bisa dipasung.

Ada dua hal yang perlu dicermati dengan makin maraknya gerbong ulama yang bermetamorfosis menjadi politisi. *pertama*, jagad keulamaan bangsa ini akan mengalami defisit deposito moral. kasarnya kita akan kehabisan deposito manusia independen yang mendudukkan dirinya di posisi tengah-tengah antara rakyat dan pemerintah. kita akan kekurangan manusia yang mampu menjaga jarak secara adil dan seimbang apabila terjadi konflik antara penghuni bangsa ini. sebab, walaupun politik adalah suatu karsa untuk menegakkan moralitas dan rasionalitas publik, tetapi kenyataan di negara kita masih jauh panggang dari pada api. *kedua*, profesi politisi ternyata jauh lebih menggiurkan. para ulama merasa dengan berpolitik mereka akan ikut secara mudah memperjuangkan idealitas dan moralitas. padahal praktik politik kita bukan lahan subur untuk idealitas dan perjuangan moral.[14] Seharusnya ulama menjaga jarak dari struktur kekuasaan, dan bukan memamahnya mentah-mentah. tugas seorang ulama dan intelektual agama tak lain dan tak bukan adalah terus menerus melakukan oposisi, yakni melakukan kritik terhadap apa-apa yang merasa perlu dikritik. karena oposisionalitas merupakan kata kunci dari fungsi ulama, maka gegar dan tapak ulama lewat fatwanya harus mengambil jarak dari dogma tertentu serta struktur kekuasaan yang memungkinkan pudarnya sikat kritis. Ulama harus pandai dalam menunjukkan ragam isu pada umat, baik lewat tulisan maupun perbuatan, mulai dari kritik ekonomi, kebijakan pemerintah, kebudayaan, politik, bahkan musik. tegasnya fungsi ulama adalah berbicara benar pada kekuasaan, terlebih pada penguasa yang lalim, korup,dan otoriter. oleh karena itu ulama ideal adalah mereka yang berani menderita untuk idealismenya, yang berani mengatakan kebenaran walaupun pahit, berani miskin walaupun diejek, berani kritis walau dilecehkan, dan yang berani berbeda walaupun dianggap melawan arus. [15]

Dalam kaitannya dengan politik, *knowledge* yang dimiliki para ulama merupakan power yang sangat potensial digunakan untuk menggalang umat secara keseluruhan guna mewujudkan suatu tindakan atau proses politik tertentu. Ini bisa dilihat ketika proses memberikan suara dalam pemilu, masyarakat awam bukan hanya memahami sebagai tindakan politik, tapi sebuah tindakan keagamaan bahkan ibadah, karena yang memerintahkan adalah ulama.

Pada akhirnya niat menegakkan keadilan dan menciptakan kesatuan adalah tolak ukur partisipasi seorang ulama dalam perjuangan melalui beragam media sosial, sebuah keyakinan yang kokoh harus dimiliki dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*,dan ketika keyakinan itu lemah, media lain adalah sebuah keharusan, toh memperjuangkan

14. Komaruddin Hidayat dan M. Yudhie Haryono, *Manuver Politik Ulama*, hlm. 11, 13.

15. *Ibid*., hlm. 15.

nilai *rahmatan lilalamin* yang sarat dengan nilai keadilan dan kesejahteraan umat bukan hanya melalui satu media.

Kesimpulan

Sosok ulama yang suci dan bersih dari kebejatan social akan dipertaruhkan ketika ingin ikut terjun ke dunia politik yang nota bene penuh dengan tipu daya dan nilai-nilai keburukan yang selama ini diajarkan kepada manusia agar dijauhi. Tapi mendiamkakn kemaksiatan juga merupakan dosa. Sebuah teori social mengatakan bahwa kejahiliyaan terjadi bukan karena banyaknya pejahatan, tapi karena orang-orang baik diam dan membiarkan. Disinilah peran ulama dan tokoh agama dibutuhkan untuk menjadi kekuatan positif antara nilai yang diperjuangkan dengan kenyataan yang jauh dari norma-norma kepatutan. Ketika berharap ke depan para tokoh agama dan ulama mendapat jatah kursi di dewan legislativ untuk menjadi suara penyeimbang dan menjadi penyambung lidah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, Teuku Ibrahim, Perang *di Jalan Allah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.

Azra, Azyumardi, "Sosialisasi Politik dan Pendidikan Islam", *Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan Madrasah*, Vol. I, nomor, 02/1/1997.

—, "Pendidikan Tinggi Islam dan Kemajuan Sains: Sebuah Pengantar", dalam Charles Michael Stanton, *Pendidikan tinggi dalam Islam*, terj. Afandi dan Hasan Asari, Jakarta: Logos, 1994.

—, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara*, Jakarta: Kompas, 2002.

Hidayat, Komaruddin dan M. Yudhie Haryono, *Manuver Politik Ulama*, Yogyakarta: Jalasutra, 2004.

Noer, Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Risalah, 1983.

—, *Umat Islam di Panggung Politik*, Jakarta: UI Press, 1988.

O'Dea, Thomas F., *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Raharjo, M. Dawan, *Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku Politik, Risalah Cendikiawan Muslim*, Bandung, Mizan, 1993.